

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI
PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA**



Diajukan Oleh :

KARESYA REZKIA PASHA

NIM. 2220216320019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI
PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA**

**Tesis
Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
KARESYA REZKIA PASHA
NIM. 2220216320019**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karesya Rezkia Pasha, S.H

NIM : 2220216320019

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG RANGKAP
JABATAN SEBAGAI PIMPINAN/PEGAWAI BADAN
USAHA SWASTA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Baniarmasin, Juni 2024
Karesya Rezkia Pasha, S.H
METERAI TEMPEL
3E3ALX242533412



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 523 / UN8.4 / SE / 2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Karesya Rezkia Pasha

Dengan Judul Tesis :

Perlindungan Hukum dan Keabsahan Akta Yang Dibuat

Oleh Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pimpinan/Pegawai Badan Usaha Swasta

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 21 Agustus 2024

Direktur,



M. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA

Oleh :

Karesya Rezkia Pasha,¹ Suprpto²

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuatnya di tempat itu atau dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris yang menjadi syarat sahnya. Mereka juga harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UUJN dan memperhatikan larangan-larangan yang diatur di dalamnya. UUJN mengatur batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Suatu akta yang dinotariskan dan ditandatangani oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena tugasnya adalah mengurus akta otentik. Praktik rangkap jabatan juga dapat merugikan masyarakat secara umum karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang seharusnya dapat dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan akta otentik

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang melakukan tangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha swasta. Serta untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris terhadap klien yang aktanya dinyatakan tidak sah dikarenakan rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha swasta

Akta notaris rangkap jabatan hanyalah akta di bawah tangan. Kekuasaan utama Notaris adalah membuat akta asli; apabila Notaris melanggarnya dengan melakukan beberapa tugas, maka Notaris tidak diperkenankan membuat akta dan tidak dapat diketahui keabsahannya. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat wajib diterapkan kepada Notaris yang memangku jabatan berbeda untuk menjamin tanggung jawabnya.

¹ NIM : 2220216320019

² Pembimbing Utama

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI
PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA

ABSTRAK

Oleh :

Karesya Rezkia Pasha,³ Suprpto⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Akta Otentik, Rangkap Jabatan, Badan Usaha Swasta

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang melakukan tangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha swasta. Serta untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris terhadap klien yang aktanya dinyatakan tidak sah dikarenakan rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha swasta. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian *Pertama* : Akta notaris rangkap jabatan hanyalah akta di bawah tangan. Kekuasaan utama Notaris adalah membuat akta asli; apabila Notaris melanggarnya dengan melakukan beberapa tugas, maka Notaris tidak diperkenankan membuat akta dan tidak dapat diketahui keabsahannya. Dalam hal ini akta hanya merupakan dokumen pribadi yang harus diakui dan ditandatangani oleh para pihak. *Kedua* : Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat wajib diterapkan kepada Notaris. Dewan memantau Notaris atas pelanggaran dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Adapun upaya agar tidak lagi terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris, maka perlu memaksimalkan peran dari Majelis Pengawas notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris, berakibat pada akta yang dibuat notaris tersebut. Serta perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Notaris tersebut dan Notaris lainnya. Kemudian perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam UUJN mengenai kedudukan akta dan akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam keadaan rangkap jabatan agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

³ NIM : 2220216320019

⁴ Pembimbing Utama

LEGAL PROTECTION AND VALIDITY OF DEEDS MADE BY NOTARIES
WHO HOLD CONCURRENT POSITIONS AS LEADERS/EMPLOYEES OF
PRIVATE BUSINESS ENTITIES

By :

Karesya Rezkia Pasha,⁵ Suprpto⁶

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Keywords : Authentic Deed, Dual Position, Private Business Entity

The purpose of this research is to determine the validity of notarial deeds that capture positions as leaders / employees of private business entities. And to find out the notary's responsibility to clients whose deeds are declared invalid due to concurrent positions as leaders / employees of private business entities. By using normative juridical research, this research is prescriptive in nature, namely answering legal issues by describing, examining, studying, and explaining precisely and analyzing applicable laws and regulations as well as from various legal expert opinions, with the aim of getting answers to the problems raised. *First* Research Result: Notarial deeds of multiple positions are only deeds under the hand. The main power of a Notary is to make an original deed; if the Notary violates it by performing several tasks, the Notary is not allowed to make a deed and its validity cannot be known. In this case the deed is only a personal document that must be acknowledged and signed by the parties. *Second*: Administrative sanctions in the form of written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal shall be applied to Notaries. The Board monitors Notaries for violations in the implementation of their responsibilities and sanctions those who commit violations. As for efforts to prevent the occurrence of concurrent positions carried out by Notary, it is necessary to maximize the role of the Notary Supervisory Council to carry out supervision and inspection routinely considering the existence of concurrent positions carried out by notaries, resulting in deeds made by the notary. As well as the need for stricter sanctions against Notaries who hold concurrent positions, namely dishonorable dismissal in order to have a deterrent effect on the Notary and other Notaries. Then the need for a firmer regulation in the UUJN regarding the position of the deed and the legal consequences of the notarial deed made in a dual position in order to create certainty and legal protection for the community.

⁵ NIM : 2220216320019

⁶ Pembimbing Utama

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah dan berkat-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof.Dr.Suprpto, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, Juni 2024

Karesya Rezkia Pasha, S.H

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	42
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH	
NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI	
PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA	47
A. Akta Notaris sebagai Akta Otentik	47
B. Larangan Bagi Notaris Rangkap Jabatan Sebagai Pimpinan	
atau Pegawai Badan Usaha Swasta	58
C. Kedudukan Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang	

	Rangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Atau Pegawai Badan Usaha Swasta.....	68
BAB III	TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KLIEN YANG AKTANYA DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI PIMPINAN ATAU PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA.....	75
	A. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapannya	75
	B. Sanksi bagi Notaris Atas Akta Yang Menjadi Dibawah Tangan Karena Rangkap Jabatan	87
BAB IV	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		